

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Liga Arab (Arab League) merupakan salah satu organisasi yang terbentuk atas regionalisme negara-negara Arab di Timur Tengah. Liga Arab merupakan organisasi regional yang terdiri dari negara-negara Arab yang terdapat di wilayah Asia Barat, Utara dan Afrika Timur Laut. Pembentukan organisasi ini bertujuan untuk mendekatkan hubungan antara negara-negara anggota dan meningkatkan kerjasama diantara mereka, menjaga kemerdekaan dan kedaulatan serta mempertimbangkan segala kepentingan negara-negara Arab. Liga Arab pada dasarnya berfokus pada isu politik kemandirian, dan sebagai regionalisasi yang bertujuan untuk mempererat ikatan negara-negara Arab yang terpecah oleh penjajah pada masa kolonialisme. Untuk mempererat hubungan tersebut negara-negara Arab melakukan kerjasama politik, ekonomi dan keamanan, bahkan Liga Arab juga ikut serta dalam proses perundingan negosiasi untuk terciptanya perdamaian dengan negara lain.

Liga Arab dibentuk pada tanggal 22 Maret 1945, yang pada awalnya beranggotakan negara Mesir, Irak, Yordania (Tahun 1946), Lebanon, Arab Saudi, Suriah dan menyusul Yaman pada tahun 1945. Saat ini Liga Arab beranggotakan 22 negara dan memiliki 3 negara yang menjadi pamantau atau pengamat.

Terbentuknya Liga Arab yang kemudian dikenal saat ini didasarkan atas *Pact of The League of Arab States* (Pakta Liga Arab) yang menjadi sebuah konstitusi dasar bagi anggotanya yang bergabung. Seiring dengan perkembangan Zaman, Liga Arab kemudian dijadikan sebagai media penyusunan dokumen-dokumen penting Arab guna mendukung integritas ekonomi antar negara anggotanya, yaitu pembentukan Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Arab (*Joint Arab Economic Action Charter*) yang diinisiasikan oleh Libya. Sehingga dalam perkembangannya Liga Arab membentuk integritas yang progresif bersama dengan regional-regional lainnya.

Perkembangan politik internasional menunjukkan bahwa Liga Arab telah banyak memperoleh kemajuan dan kemunduran dalam menjalankan tugas dan tujuannya. Hal ini tidak terlepas dari gejolak yang terjadi di Arab saat ini. Beberapa langkah strategis yang dilakukan dalam menangani konflik seperti di Irak dan Palestina menjadi catatan ketidak efektifan fungsi Liga Arab di Timur Tengah. Perbedaan orientasi politik dan kepentingan adalah salah satu penyebab gagalnya Liga Arab. Keberadaan Israel sebagai sebuah negara juga menjadi batu sandungan bagi perdamaian negara-negara anggotanya.¹

Perkembangan isu-isu di Timur Tengah menjadi tugas berat bagi Liga Arab untuk membangun regionalismenya. Saat ini, Liga Arab dihadapkan pada fenomena Arab Spring yang membawa kondisi politik dan keamanan di negara arab terganggu. Banyaknya resolusi demonstrasi untuk menjatuhkan rezim yang

¹ <http://www.frontroll.com/berita-3677-dilema-liga-arab-dalam-upaya-menselesaikan-konflik-di-suriyah.html> diakses pada 27 January 2016

lama menjadi demokratisasi diberbagai negara anggotanya. Hal ini menjadikan banyaknya protes keras yang menyebabkan timbulnya kekacauan disuatu negara yang berimbas dari satu negara ke negara lain pun ikut terpengaruh juga untuk menggantikan rezimnya seperti yang terjadi di negara Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah.

Gejolak reformasi di Timur Tengah yang banyak menimbulkan korban sipil menjadi refleksi bagi regionalisme liga arab dalam memelihara perdamaian di Timur Tengah. Krisis ekonomi dan politik di Mesir, Libya menjadi tolak ukur Liga Arab dalam menyelesaikan kasus. Akan tetapi, krisis politik Suriah menjadi salah satu krisis yang besar yang terjadi selama Arab Spring berlangsung. Krisis tersebut berubah menjadi konflik besar sehingga mengundang berbagai negara untuk ikut serta dalam konflik Suriah seperti, Rusia, Amerika Serikat, Iran, dan Arab Saudi.

Negara Suriah sejak 18 Maret 2011 telah dilanda gelombang demonstrasi besar-besaran oleh kelompok anti pemerintahan Suriah, demonstrasi besar-besaran tersebut dipicu antara lain oleh gelombang demokratisasi yang sebelumnya telah melanda Tunisia, Mesir dan Libya, rakyat Suriah berdemonstrasi meminta Presiden Bashar al-Assad lengser dari jabatannya. Pemerintah Bashar al-Assad memilih untuk menggunakan kekerasan dalam menanggapi protes untuk menurunkan dirinya dari kursi kepresidenan oleh kelompok oposisi pemerintah. Penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah kepada para demonstran berujung pada besarnya jumlah korban dari pihak demonstran yang tewas. Menurut perkiraan PBB yang disampaikan oleh

sekertaris jenderal, Ban Ki moon, menyatakan bahwa, korban tewas akibat kekerasan pemerintah di Suriah telah mencapai 3.500 jiwa.²

Pada akhirnya krisis politik di Suriah berubah menjadi perang antara pihak oposisi pemerintahan dengan Bassar Al-Assad. Masyarakat Suriah yang berambisi untuk melengserkan Assad dari kekuasaan pemerintah mengambil langkah anarkis dengan membangun blok-blok separatis di Suriah. Hal ini diperparah dengan kondisi ekonomi yang makin terpuruk sehingga menyebabkan kemiskinan dan pengangguran yang sangat tinggi di Suriah. Bahkan aktifitas ekonomi Suriah pasca demonstrasi tersebut didominasi oleh perdagangan senjata ilegal.

Berbagai usulan dalam penyelesaian konflik dari organisasi internasional tidak memperoleh hasil. Liga Arab sebagai organisasi regional juga secara terang-terangan telah meminta Suriah untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan kepada para demonstran. Liga Arab pun mengeluarkan ultimatum bagi pemerintah Suriah untuk menghentikan kekerasan terhadap para demonstran.³ Tetapi ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh pemerintahan di Damaskus. Pada Akhirnya Liga Arab mengadakan pertemuan darurat sebagai respon terhadap krisis yang berkepanjangan di Suriah. Dalam pertemuan daruratnya, Liga Arab memutuskan membekukan keanggotaan Suriah serta melarang berpartisipasi dalam kegiatan di Liga Arab. Selain itu proposal damai Liga Arab meminta anggotanya menarik duta besar dari masing-masing anggota yang berada di Suriah

² www.suaramerdeka.com “Ditekan Liga Arab Suriah bebaskan ribuan tahanan” diakses pada tanggal 26 January 2016

³ http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/11/111125_suriah_ligaarab.shtml yang diakses pada tanggal 27 January 2016

dan menyerukan militer Suriah menghentikan aksi pembunuhan warga sipil. Liga Arab juga telah menjatuhkan sanksi ekonomi dan politik terhadap suriah.

Akan tetapi, upaya-upaya tersebut tidak mampu meredam krisis yang terjadi. Dan pada akhirnya krisis tersebut menjadi konflik dan perang saudara antara oposisi dan pro pemerintahan. Konflik yang berkepanjangan tersebut bahkan banyak menimbulkan permasalahan yang baru, dimana banyaknya aktor yang terlibat langsung dalam konflik Suriah seperti negara-negara Arab, Negara Barat, Rusia, kelompok militan di Arab. Persolan lain juga meluas dimana konflik tersebut membuat migrasi besar-besaran dari masyarakat Suriah yang mencari wilayah aman, sehingga konflik tersebut sangat mengancam keutuhan Arab, yang juga mengancam regionalisasi Liga Arab.

Meluasnya krisis tersebut membuktikan bahwa regionalisasi dalam kerangka Liga Arab belum efektif dapat meredam konflik. Ketidakefektifan Liga adalah banyak disebabkan lemahnya pelembagaannya, sehingga negara anggota tidak secara serius dalam menegosiasikan jalan terbaik untuk perdamaian Suriah, yang banyak disebabkan oleh bertabrakannya kepentingan negara-negara anggota Liga.

Maka dari itu, penulis akan membahas secara mendalam tentang Keefektifitasan Liga Arab dalam upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah terutama dalam mengatasi konflik Suriah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah diatas, maka penulis menyimpulkan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut;

Mengapa intervensi politik yang dilakukan Liga Arab dalam upaya penyelesaian Konflik Suriah tidak efektif?

C. Tujuan Penelitian

Penulis menyimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Upaya-upaya yang dilakukan oleh Liga Arab dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, terutama pada konflik Suriah.
2. Menganalisis hambatan-hambatan Liga Arab dalam menyelesaikan konflik Suriah.
3. Dengan adanya pengetahuan tersebut dapat menjadi tambahan dapat menjadi tambahan pengetahuan untuk dunia pendidikan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Intervention

Intervensi adalah sebuah tindakan yang dimaksudkan, direncanakan, dan ditargetkan beroperasi pada sistem atau proses yang bertujuan untuk menghilangkan atau mencegah fenomena yang tidak diinginkan oleh suatu negara, komunitas, organisasi internasional, ataupun individu.

Menurut Kathryn Seifert mengartikan intervensi digunakan untuk mencegah segala aktivitas kekerasan yang terjadi di masyarakat.⁴ Maka dari itu,

⁴ Kathryn Seifert, 2012. “*Youth Violence, Theory, Prevention, and Intervention*”. Springer Publishing Company New York. Halaman 201

intervensi merupakan keputusan rasional yang dilakukan untuk mengurangi dampak besar kekerasan dari sebuah fenomena yang terjadi.

Dalam hubungan internasional intervensi dikenal sebagai intervensi internasional yang dilakukan oleh negara untuk mereduksi dampak, dan mencegah dampak yang berkelanjutan dari kekerasan atau kriminalitas yang dilakukan oleh berbagai actor seperti negara, kelompok dan individu. Intervensi internasional di banyak negara-negara yang ada di dunia telah mengambil banyak bentuk baik dari segi militer, ekonomi dan politik. Bentuk intervensi memiliki masalah dalam prinsip dan praktek. Tidak peduli seberapa baik niat negara untuk mengintervensi, tetap saja negara kedua tidak dapat menghindari intervensi tersebut.⁵

Berbagai fenomena yang terjadi di dunia internasional melihat bahwa konflik yang terjadi dalam negara banyak menyebabkan perhatian dari negara lain yang menggunakan alasan etika dan moralitas sebagai perilaku rasional untuk melakukan intervensi. Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaian. Konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Namun terkadang harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik oleh negara atau sebagai Organisasi Regional bahkan Organisasi Internasional. Dalam Piagam PBB, Pasal 39 memberi Dewan Keamanan PBB kemampuan untuk mengotorisasi intervensi militer dalam kasus-kasus yang dianggap merupakan ' ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional, dan Pasal 51 mengakui bahwa semua negara memiliki hak untuk

⁵ <http://www.haryoprasodjo.com/2014/04/konsep-intervensi-dalam-hubungan.html>

menggunakan kekuatan sebagai berarti pertahanan diri.⁶ Hal ini lah yang menjadi perhatian bahwa konflik yang dapat mengancam keamanan internasional perlu diintervensi sebagai etika dan moralitas bersama.

Organisasi regional juga dapat berperan aktif dalam memelihara perdamaian dunia dan mereduksi tantangan permasalahan yang menyerang negara (Bab VIII Piagam PBB, Regional Arrangements).⁷ Bab VIII Piagam PBB pada artikel ke-52 menyebutkan bahwa:

“the existence of regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action provided that such arrangements or agencies”

Artikel tersebut menyiratkan bahwa PBB menaruh harapan besar terhadap organisasi regional yang dianggap mampu menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan wilayahnya.

Dengan melihat kembali beberapa upaya diatas, penulis melihat upaya dalam penyelesaian konflik mengajak pihak-pihak yang berkonflik masuk ke dalam suatu perjanjian politik untuk mengejar suatu konsensus dan dapat membantu menyelesaikan sumber-sumber konflik yang ada. Perjanjian politik atau kesepakatan yang berusaha dihasilkan dibuat melalui suatu forum bersama yang serius dan ditandatangani oleh masing-masing pihak secara formal. Kesepakatan yang bersifat politik sangat diperlukan, karena jika mengacu pada

⁶ Bellamy, A.J. Dalam “Contemporary Security Studies”. New York: Oxford University Press 2010. Hal 362.

⁷ Dan peran organisasi regional ini ditekankan kembali dalam laporan Sekjen PBB, Boutros Ghali pada 1992 yang berjudul “An Agenda for Peace”-Anwar, D.F. 2011. *Peran Indonesia akan Memperkuat Kerjasama ASEAN-PBB* dalam <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/137-mei-2011/1108-peran-indonesia-akan-memperkuat-kerjasama-asean-pbb.html> diakses pada tanggal 16 Oktober 2012

pandangan. Sehingga kondisi konflik kontemporer, di mana konflik di dalam lingkup negara yang terjadi sebagian besar terjadi karena dikendalikan oleh motif politik.

Penyelesaian konflik dengan intervensi politik pihak ketiga merupakan salah satu jalan yang dipilih oleh berbagai organisasi dalam level internasional dalam upaya menangani konflik. Hal ini sering dilakukan oleh berbagai organisasi dengan melakukan upaya negosiasi atau bahkan melakukan langkah strategis dalam menyusun kebijakan politik terhadap pihak yang bersengketa.

Lebih lanjut Duff dan Gillig mengartikan intervensi dilakukan harus secara serius memperhatikan hubungan antara actor yang terlibat baik itu relasi antara kelompok, kelompok dan organisasi lainnya, kelompok dengan organisasi kriminal, kelompok dengan anggota-anggotanya.⁸

Salah satu kasus yang terjadi di Suriah merupakan permasalahan yang kompleks dimana terdapat berbagai kepentingan di dalamnya. Pihak pemerintah yang berperang melawan pihak oposisi yang menginginkan kemerdekaan menjadi isu hangat di kalangan negara-negara di dunia internasional. Lembaga regional yang mempunyai legitimasi lebih tinggi dibandingkan negara pun dapat dikatakan mengalami stagnansi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Liga Arab menjadi salah satu harapan bagi masyarakat Suriah untuk segera menyelesaikan konflik yang berkepanjangan tersebut.

Liga Arab telah menjalankan upaya dengan mediasi dan negosiasi antara pemerintah Suriah dan pihak oposisi. Akan tetapi upaya tersebut tidak membuat

⁸ Kathryn Seifert, 2012. "*Youth Violence, Theory, Prevention, and Intervention*". Springer Publishing Company New York. halaman 205

konflik tersebut meredup, bahkan semakin membesar menjadi perang saudara. Untuk mencapai jalan tersebut Liga Arab membuat intervensi politik dengan mencabut keanggotaan Suriah dalam organisasi regional tersebut.

Perkembangan konflik Suriah semakin sulit teratasi dimana intervensi politik yang dijalankan oleh Liga Arab tidak berjalan, sedangkan Liga Arab tidak dapat melakukan intervensi militer, karena tidak memiliki legitimasi dikalangan negara-negara arab. Sehingga agenda-agenda intervensi militer dijalankan oleh beberapa negara seperti Arab Saudi yang membentuk koalisi dengan pihak oposisi, dan Iran bersama Rusia dalam blok pro terhadap pemerintahan. Intervensi tersebut dijalankan juga adalah sebagai implemmentasi politik luar negerinya karena peran Liga Arab yang tidak signifikan dalam penyelesaian konflik Suriah. Sedangkan hambatan dari dalam yang terjadi adalah terpecahnya oposisi pemerintahan kedalam beberapa kelompok, sehingga kepentingan masing-masing kelompok berbeda-beda. Hal tersebut menjadi hambatan Liga Arab dalam melakukan negosiasi. Ditambah lagi dengan adanya intervensi militer dari kelompok ISIS yang juga membuat blok baru, menambah kompleksnya konflik yang terjadi.

2. Rezim Internasional

Sejak beberapa dekade yang lalu hingga sekarang, pengamat ilmu hubungan internasional telah mengamati rezim internasional, dan minat ilmiahnya lebih ke dalam prinsip-prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang mengatur perilaku negara di area regional maupun internasional dengan isu spesifik hubungan internasional terus menjadi kuat.

Rezim internasional telah menjadi fokus utama penelitian Hubungan Internasional selama lebih dari satu dekade. Salah satu pemikiran yang telah membentuk sebuah diskusi yang menjelaskan rezim internasional adalah realisme yang memperlakukan relasi kekuasaan sebagai variabel kunci.⁹

Realisme secara spesifik menjelaskan bahwa rezim internasional berperilaku berdasarkan *interest-based* yang memberikan asumsi sentral yang terkemuka dalam rezim internasional seperti "*contractualism*" yang diungkapkan oleh Koehane dan kontribusinya yang kita sebut sebagai "*situation-structural*" telah diadopsi. Oleh karena itu, suatu negara yang tergabung dalam sebuah organisasi regional maupun internasional memiliki tujuan tertentu dan kepentingan domestik yang ingin diaplikasikan di eksternal agar mampu terus berkembang.

Gambar 1.1: Aliran Pemikiran dalam studi Rezim Internasional¹⁰

Table 1. *Schools of thought in the study of international regimes*

	Realism	Neoliberalism	Cognitivism (especially "strong cognitivism")
Central variable	power	interests	knowledge
"Institutionalism"	weak	medium	strong
Meta-theoretical orientation	rationalistic	rationalistic	sociological
Behavioral model	concerned with relative gains	absolute gains maximizer	role-player

Realisme menjelaskan bahwa kekuasaan merupakan titik pusat perhatian dalam rezim internasional dan terus menjadi senjata utama dalam proses

⁹ Andreas Hasenclever. 2004. "*Theories of international regimes*" Cambridge University Press. New York.

¹⁰ Ibid

pengambilan keputusan oleh sebuah organisasi regional atau internasional, serta negara-negara anggotanya. Maka dari itu, tidak menjadi sebuah isu baru jika salah satu negara anggota tidak mematuhi kebijakan yang telah diputuskan oleh organisasi tersebut karena realisme menjelaskan bahwa secara instusionalisme rezim internasional dianggap lemah akan legitimasinya. Hal ini karena disebabkan oleh actor yang bermain dalam rezim hanyalah sebatas actor yang dominan atau yang kuat.

Kekuatan “*power*” negara akan sangat mempengaruhi berjalannya sebuah legitimasi serta proses pembuatan kebijakan dari rezim internasional. Dalam perspektif Realisme, akan ada satu atau beberapa negara yang akan memanfaatkan kekuatannya untuk kepentingan nasional yang akan diproseskan dalam rezim internasional. Akibatnya, legitimasi rezim internasional tidak akan berjalan dengan efektif karena ada beberapa anggota negara yang menggunakan kekuatannya untuk kepentingan pihak yang memiliki power bukan untuk kepentingan bersama demi menyelesaikan konflik yang mengganggu stabilitas keamanan dan perekonomian regional.

Krasner dalam karangannya menyebutkan bahwa rezim sebagai sumber dari *power*. Sumber pokok dari aktornya tidak berubah namun kemampuannya untuk mempengaruhi perilaku aktor lain meningkat dan dapat terkondisikan. Situasi seperti itu tidak mungkin muncul ketika rezim pertama kali diciptakan. Pada saat sebuah rezim internasional dibentuk, karakteristik rezim cenderung bertepatan erat dengan preferensi aktor paling kuat dalam sistem.¹¹ Aktor lemah tidak

¹¹ Krasner, Stephen D. 1982. *Regimes and the Limits of Realism: Regimes as Autonomous*

mungkin dapat menggunakan rezim untuk menambah sumber daya nasional mereka sendiri. Namun negara dunia ketiga dalam kenyataannya telah menggunakan rezim internasional untuk memperkuat *powernya* serta mengendalikan lajur dari transaksi internasional dalam beberapa isu area. Negara-negara dunia ketiga telah menganjurkan sistem alokasi berdasarkan kontrol negara otoritatif dari pada pasar. Dalam pandangan Krasner, rezim juga mempunyai dampak pada *power* dari kelompok tertentu dalam sebuah negara.¹² Dalam kondisi ini, keputusan yang diambil oleh oleh rezim cenderung tidak efektif karena kurangnya legitimasi dari negara-negara anggotanya.

Teori rezim internasional menggambarkan perilaku serta reaksi Liga Arab pada konflik yang terjadi Suriah untuk menstabilkan keamanan serta menciptakan perdamaian bagi seluruh negara-negara anggotanya. Liga Arab memiliki tanggung jawab yang sangat signifikan dalam pengimplementasian tujuan tersebut. Dalam proses penyelesaian Konflik Suriah, Liga Arab sebagai organisasi regional yang mempunyai kekuasaan diatas negara-negara Arab mempunyai kewenangan dalam mengambil tindakan dalam konflik Suriah. Akan tetapi, dengan menggunakan pandangan realisme, peneliti menemukan kelemahan Liga Arab adalah mendominasinya negara anggota yang mempunyai *power* dalam proses pengambilan keputusan ataupun resolusi yang dihasilkan Liga. Arab Saudi dan Qatar mempunyai posisi yang kuat ditambah dengan kekuatan dan kepentingan negara yang mendominasi tersebut maka central variable dari keberlangsungan

Variables, dalam *International Organization*. Yang diambil dalam website http://rizka-meilinda-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-101501-RezimRezim%20Internasional-Pendekatan%20Rezim%20Internasional%20Berbasis%20Power.html

¹² *ibid*

atau kelembagaan Liga Arab dikuasai oleh negara tersebut. Akan tetapi sesuai dengan pandangan realis, dengan adanya kekuatan negara-negara mendominasi kelembagaan Liga akan lemah dan terbukti bahwa legitimasi Liga Arab lemah terhadap negara-negara anggotanya, sehingga negara-negara anggotanya lebih memilih untuk mengintervensi secara langsung mengatasnamakan negara.

Selain itu, Liga Arab sangat sulit menghentikan Konflik karena kebijakan yang dikeluarkan oleh Liga Arab terkait sanksi, dan pembekuan keanggotaan Suriah tidak menjadi masalah yang serius bagi Suriah.

E. Hipotesis

Intervensi Liga Arab dalam menyelesaikan konflik suriah tidak efektif karena:

1. Lemahnya kelembagaan dalam pembuatan keputusan intervensi.
2. Divergennya kepentingan anggota Liga Arab dalam mengimplementasikan intervensi.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif. Creswell menyatakan:

“Qualitative research is a loosely defined category of research designs or model, all of which elicit verbal, visual, tactile, olfactory, and gustatory data in the form of descriptive narratives like field notes, recordings, or other transcriptions from audio and videotapes and other written records and pictures or films.”¹³

¹³ Pupu Saeful Rahmat. “Penelitian Kualitatif”. Diunduh dari <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf> pada 27 Agustus 2015 pukul 16.00 WIB.

Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau dengan metode perhitungan. Maka dari itu data penelitian kualitatif tidak hanya disajikan dalam bentuk bukan angka, tetapi juga pertanyaan dan metode penelitian dimulai dari hal yang umum kemudian mengerucut dan terfokus.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah ‘mengapa’ penulis menggunakan pendekatan deskriptif yang akan secara jelas menggambarkan situasi keefektifitasan Liga Arab dalam upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah terutama dalam mengatasi Konflik Suriah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan studi pustaka. Studi pustaka adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan konsep melalui berbagai macam media kepustakaan baik melalui buku-buku, majalah dan sumber informasi penunjang seperti website, dokumentasi, majalah, Koran, agenda dan hasil penelitian yang terdapat dimana saja yang dianggap mempunyai nilai keabsahan yang tinggi.

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis analisis data kualitatif tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi seperti yang

disebutkan oleh Mile.¹⁴ Untuk lebih jelasnya tahap-tahap tersebut dijelaskan di bawah ini:

1. *Data reduction* (Reduksi data)

Karena dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data Display* (penyejian data)

Tahap kedua dalam menganalisis data yaitu menyajikan data. Data yang paling banyak dalam kualitatif yaitu teks naratif. Tetapi, penyajian data berupa diagram, matriks, grafik dan sebagainya diperbolehkan.

3. *Conclusion drawing/ Verification*

Selanjutnya langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

¹⁴ M. Mile. 1984. "*Qualitative Data Analysis A Sourcebook Of New Methods.*" Beverly Hills California: Sage Publications. Hal 15-21

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis yang terstruktur, penulis membuat kerangka dan sistematika tulisan yang terdiri dari lima bab;

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metode penelitian.

BAB II Tentang Sejarah dan Dinamika Liga Arab.

BAB III Dinamika konflik suriah dan intervensi liga arab dalam penyelesaian konflik suriah. Sedangkan.

BAB IV Akan membahas analisis Faktor-faktor ketidakefektifan intervensi liga arab dalam penyelesaian konflik suriah.

BAB V Bab ini merupakan bab akhir yang akan menutup karya tulis ini, berisi rangkuman dari bab sebelumnya setra disusun dalam bentuk kesimpulan.